

Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Inpres 12/79 Macanang

¹Melani Selvina Putri, ²Tri Wirdani, ³Ikmal Jaya

^{1,2,3}Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Barebbo
e-mail: melaniselvina Putri@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the implementation of inclusive education in Indonesia, focusing on a case study at SD Inpres 12/79 Macanang, South Sulawesi. Using a qualitative method, this study explores the challenges and efforts in implementing inclusive education at the primary school level. The main findings indicate that despite a commitment to accept and serve students with special needs, schools still face obstacles such as limited trained human resources, inadequate infrastructure, and lack of public understanding. Positive efforts are evident through teacher training, the formation of learning communities, and plans for facility improvements. Positive impacts are reflected in increased participation of students with special needs and parental satisfaction. This research highlights the importance of continuous evaluation, professional development of teachers, and stronger policy support to realize quality and sustainable inclusive education in Indonesia. In conclusion, although there is progress, significant efforts are still needed in developing adaptive curricula, improving teacher competencies, providing adequate facilities, and collaboration between schools, families, and communities to optimize the implementation of inclusive education.

Keyword: Education, Implementation, Inclusive

PENDAHULUAN

Aspek krusial dalam perkembangan suatu negara adalah pendidikan. Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan berperan vital dalam meningkatkan intelektualitas dan kualitas sumber daya manusia bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional dirancang untuk mengembangkan potensi, membentuk karakter, dan membangun identitas bangsa yang bermartabat, dengan tujuan akhir mencerdaskan kehidupan masyarakat. Aspirasi pendidikan ini selaras dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Melalui proses pendidikan, diharapkan generasi penerus bangsa dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki keimanan kuat, moralitas tinggi, kesehatan prima, wawasan luas, kecakapan, kreativitas, kemandirian, serta menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membentuk masa depan bangsa yang lebih cerah dan berkualitas.

Dalam upaya mencapai sasaran pendidikan nasional, pendidikan inklusi dalam pendidikan memegang peranan strategis yang signifikan. Konsep ini dirancang untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, tanpa terkecuali. Hal ini mencakup mereka yang menghadapi tantangan fisik, emosional, mental, maupun sosial, serta individu-individu yang dianugerahi kecerdasan luar biasa atau bakat khusus. Dengan menerapkan prinsip inklusivitas, sistem pendidikan berusaha menghapus hambatan dan diskriminasi, sehingga setiap anak, terlepas dari kondisi atau kemampuannya, dapat memperoleh kesempatan belajar yang optimal. Pendekatan ini

tidak hanya bertujuan untuk mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama, tetapi juga untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. (Rahim, 2016). Meskipun demikian, implementasi sistem pendidikan inklusi masih menghadapi beragam kendala. Salah satu isu utama adalah terbatasnya tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang ini. Selain itu, masih kurangnya penyebaran informasi dan pelatihan kepada para pengajar mengenai konsep dan praktik pendidikan inklusi juga menjadi hambatan tersendiri. Infrastruktur pendukung yang belum memadai turut menjadi tantangan dalam penerapan pendidikan inklusi secara efektif. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum yang tepat dan sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan khusus belum mencapai tahap optimal. Hal-hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani demi terwujudnya sistem pendidikan inklusi yang ideal dan efektif (Ramadhana, 2020).

Mengingat tantangan yang ada, diperlukan langkah-langkah konkret dan berkesinambungan dari berbagai elemen untuk meningkatkan mutu pendidikan inklusi di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui program pelatihan dan pengembangan yang intensif, memperluas kampanye edukasi tentang pendidikan inklusi kepada masyarakat luas dan pihak-pihak terkait, memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran inklusif, merancang serta mengimplementasikan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan adanya dedikasi dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pendidikan inklusi dapat menjadi katalis dalam mewujudkan aspirasi bangsa Indonesia. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan taraf kecerdasan masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan diantaranya pendidikan inklusi merupakan isu penting dalam pendidikan di Indonesia. Menurut data statistik, sekitar 3,3% dari populasi anak berusia 5-19 tahun mengalami disabilitas. Mengingat total penduduk dalam rentang usia ini mencapai 66,6 juta jiwa pada tahun 2021, diperkirakan terdapat kurang lebih 2.197.833 anak penyandang disabilitas. Namun, menurut informasi dari Kemendikburistek per Agustus 2021, hanya 269.398 anak yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan program pendidikan inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa baru sekitar 12,26% anak penyandang disabilitas yang mengakses pendidikan formal. Angka ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di kalangan anak-anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan potensi yang ada (Kalalo et al., 2022).

Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan guru, dan stigma masyarakat terhadap ABK. Belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan ini diterapkan

di beberapa sekolah di Indonesia utamanya sekolah yang dituju yaitu SD Inpres 12/79 Macanang serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yang menitikberatkan pada deskripsi dan analisis mendalam. Fokus utamanya adalah menggali makna dan proses dari sudut pandang subjek penelitian. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, mengembangkan teori, dan menggambarkan kompleksitas realitas yang diteliti. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga cara yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dibantu oleh peralatan pendukung seperti alat perekam suara, kamera, panduan wawancara, serta perangkat lain yang diperlukan selama proses penelitian (Qalbi et al., 2022). Lokasi penelitian berada di SD Inpres 12/79 Macanang, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada 15 Juni 2024, mencakup tahap observasi, wawancara, hingga pengolahan data. Pelaksanaannya disesuaikan dengan aktivitas terkait pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pendidikan inklusi di SD Inpres 12/79 Macanang menunjukkan komitmen sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pendidikan inklusi yang dikemukakan oleh (Mustika et al., 2023), yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang inklusif. Komitmen ini tercermin dari keterbukaan sekolah dalam menerima siswa ABK tanpa diskriminasi, meskipun masih terbatas pada jumlah tertentu per kelas. Tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Kepala sekolah SD Inpres 12/79 Macanang mengakui bahwa guru-guru yang ada merupakan guru kelas reguler tanpa latar belakang khusus dalam pendidikan luar biasa (PLB). Hal ini menimbulkan kesenjangan kompetensi dalam melayani kebutuhan belajar ABK. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Setiawan et al., 2020) yang menekankan pentingnya guru memahami karakteristik dan kebutuhan belajar siswa, terutama dalam konteks pendidikan inklusi. Untuk mengatasi tantangan SDM, sekolah berencana meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Rencana ini menunjukkan kesadaran sekolah akan pentingnya peningkatan kualitas pengajaran dalam pendidikan inklusi.

Upaya ini sejalan dengan rekomendasi para ahli pendidikan inklusi yang menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dalam menghadapi tantangan

pendidikan inklusi. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah ini. Kepala sekolah SD Inpres 12/79 Macanang mengakui bahwa fasilitas khusus untuk ABK, seperti alat bantu untuk siswa dengan gangguan penglihatan atau pendengaran, belum tersedia. Namun, ada komitmen untuk mengembangkan fasilitas ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan ketersediaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah menyadari pentingnya lingkungan belajar yang aksesibel dan mendukung, sebagaimana ditekankan dalam konsep pendidikan inklusi. Meskipun menghadapi tantangan, sikap positif dan kesabaran guru dalam menghadapi siswa ABK, seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru SD Inpres 12/79 Macanang, menunjukkan adanya dukungan sosial yang penting bagi keberhasilan pendidikan inklusi. Hal ini sejalan dengan konsep dukungan sosial yang dikemukakan oleh (Alfaris, 2022), di mana kenyamanan dan kepedulian yang diberikan oleh orang lain, dalam hal ini guru, memiliki peran penting dalam membantu ABK beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan sekolah.

Kebijakan sekolah untuk membatasi jumlah siswa ABK maksimal dua orang per kelas menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip inklusivitas dan kemampuan sekolah dalam memberikan layanan yang optimal. Meskipun pembatasan ini dapat dilihat sebagai bentuk kompromis, hal ini juga dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap siswa ABK mendapatkan perhatian yang cukup tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran bagi siswa lainnya. Komitmen sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi tercermin dari rencana untuk mengundang narasumber yang kompeten dalam bidang pendidikan ABK. Hal ini menunjukkan kesadaran sekolah akan pentingnya kolaborasi dengan ahli eksternal untuk meningkatkan kapasitas internal. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik dalam pengembangan pendidikan inklusi yang menekankan pentingnya jaringan dan kemitraan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Keterbukaan sekolah untuk menerima siswa ABK tanpa target khusus menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan ini memungkinkan sekolah untuk beradaptasi dengan dinamika populasi siswa ABK dari tahun ke tahun. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal perencanaan jangka panjang dan alokasi sumber daya yang efektif untuk mendukung pendidikan inklusi. Dampak positif jangka panjang dari pendidikan inklusi, seperti yang diungkapkan oleh (Mustika et al., 2023), belum terlihat secara eksplisit dalam temuan penelitian ini. Namun, komitmen sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan inklusi menunjukkan potensi untuk mencapai manfaat-manfaat tersebut, seperti peningkatan keterampilan sosial, kemandirian, dan pemecahan masalah bagi siswa ABK, serta pengurangan stereotip dan prasangka di kalangan siswa reguler.

Implementasi pendidikan inklusi di SD Inpres 12/79 Macanang menunjukkan adanya upaya positif dalam mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus (ABK). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa guru mengajar secara klasikal namun tetap memberikan pendampingan

husus bagi siswa ABK. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusi yang dikemukakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, di mana kinerja guru diukur dari kemampuannya bekerja dengan siswa secara individual dan melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar. Kinerja akademik siswa ABK di SD Inpres 12/79 Macanang dinilai berdasarkan kemampuan individual mereka, bukan dibandingkan langsung dengan siswa reguler. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman terhadap keragaman kemampuan siswa dalam setting inklusi. Hal ini sesuai dengan konsep kinerja yang dikemukakan oleh Ivancevich dalam Direktorat Tenaga Kependidikan, yang menekankan pentingnya kepuasan dan keadaptasian dalam mengukur kinerja.

Temuan menarik dari penelitian ini adalah persepsi bahwa beberapa siswa ABK memiliki IQ lebih tinggi dibandingkan siswa reguler. Ini menunjukkan potensi yang dimiliki oleh siswa ABK dan pentingnya pendidikan inklusi dalam mengembangkan potensi tersebut. Namun, temuan ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat adanya kendala komunikasi dan perilaku yang dihadapi oleh siswa ABK. Hal ini sejalan dengan studi yang menekankan pentingnya pemahaman komprehensif tentang pendidikan inklusi bagi calon guru. Peningkatan partisipasi dan kehadiran siswa ABK sejak diterapkannya pendidikan inklusi merupakan indikator positif keberhasilan program ini. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi dapat meningkatkan akses pendidikan bagi siswa ABK, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Hal ini juga mencerminkan efektivitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa.

Kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan inklusi di SD Inpres 12/79 Macanang menunjukkan adanya dukungan dari komunitas terhadap program ini. Apresiasi orang tua atas perubahan positif yang terlihat pada anak mereka mengindikasikan bahwa pendidikan inklusi memberikan manfaat nyata bagi perkembangan siswa ABK. Namun, perlu dicatat bahwa sekolah belum melakukan evaluasi formal terhadap kepuasan orang tua, yang merupakan area penting untuk pengembangan di masa depan. Meskipun belum ada pencapaian signifikan atau prestasi khusus terkait pendidikan inklusi di SD Inpres 12/79 Macanang, hal ini dapat dipahami mengingat program ini masih relatif baru di sekolah tersebut. Temuan ini menunjukkan perlunya waktu dan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan dan menyempurnakan praktik pendidikan inklusi. Kinerja guru dalam mengelola kelas inklusi di SD Inpres 12/79 Macanang menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan siswa reguler dan ABK. Namun, temuan penelitian juga mengindikasikan perlunya peningkatan kompetensi guru dalam menangani kebutuhan khusus siswa ABK, terutama dalam mengatasi tantangan perilaku dan komunikasi.

Penerapan pendidikan inklusi di SD Inpres 12/79 Macanang mencerminkan upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mengintegrasikan sepenuhnya siswa ABK ke dalam sistem pendidikan reguler. Hal ini

menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam aspek kurikulum, metode pengajaran, dan sistem evaluasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa ABK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Inpres 12/79 Macanang telah melakukan upaya implementasi pendidikan inklusi sesuai dengan amanat Permendiknas No.70 tahun 2009. Sekolah ini telah menunjukkan komitmen untuk menerima dan melayani siswa berkebutuhan khusus, sejalan dengan prinsip pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan (Suradi, 2020). Pemberdayaan SDM menjadi langkah awal yang dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Hal ini terlihat dari upaya sekolah mengikutsertakan kepala sekolah dan guru dalam pelatihan terkait pendidikan inklusi. Tindakan ini sesuai dengan Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005-2009 yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas tenaga pendidik dalam melaksanakan program pendidikan inklusi (Nisak, 2018).

Proses penerimaan siswa berkebutuhan khusus di SD Inpres 12/79 Macanang dilakukan secara terbuka melalui sistem PPDB yang sama dengan siswa reguler. Hal ini mencerminkan implementasi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Meskipun sekolah telah melakukan sosialisasi terkait pendidikan inklusi, masih terdapat keterbatasan dalam hal pelatihan khusus bagi guru untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan inklusi ke depan. Fasilitas dan akomodasi untuk siswa berkebutuhan khusus di SD Inpres 12/79 Macanang masih terbatas. Sekolah menggunakan fasilitas yang ada dan belum memiliki sarana khusus seperti toilet untuk siswa disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memenuhi standar aksesibilitas sesuai dengan prinsip pendidikan inklusi yang digariskan dalam UU No. 20 tahun 2003.

Pelibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusi telah dilakukan oleh sekolah melalui komunikasi aktif dan partisipasi dalam program-program sekolah. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan inklusi yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Mulyah et al., 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di SD Inpres 12/79 Macanang masih dalam tahap awal dan menghadapi beberapa tantangan. Hal ini mencerminkan realitas bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Komitmen SD Inpres 12/79 Macanang untuk menerima siswa berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusi. Hal ini sejalan dengan semangat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang

menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pembentukan komunitas belajar "Sipakalebbe" untuk pengembangan guru terkait pendidikan inklusi merupakan inisiatif yang inovatif dan patut diapresiasi. Ini menunjukkan upaya sekolah untuk menciptakan budaya inklusif melalui pengembangan profesional berkelanjutan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang efektif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan gambaran dan wawasan baru tentang kompleksitas implementasi pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar, khususnya di daerah yang mungkin memiliki sumber daya terbatas di Indonesia. Meskipun terdapat komitmen dan upaya untuk mewujudkan pendidikan inklusi, masih diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat, peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kolaborasi yang lebih intensif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang dinamika implementasi kebijakan pendidikan inklusi di tingkat mikro. Akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan dan pengembangan profesional guru dalam konteks pendidikan inklusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan inklusi merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan Indonesia, bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terlatih, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Studi kasus di SD Inpres 12/79 Macanang menunjukkan adanya upaya positif dalam menerapkan pendidikan inklusi, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kompetensi guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Sekolah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi melalui pelatihan guru, pembentukan komunitas belajar, dan upaya peningkatan fasilitas sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana. Dampak positif pendidikan inklusi terlihat dari peningkatan partisipasi dan kehadiran siswa berkebutuhan khusus, serta kepuasan orang tua terhadap perkembangan anak mereka.

Adapun saran penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan, pengembangan profesional guru, dan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia. Masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan kurikulum adaptif, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi di masa mendatang serta sebagai bahan refleksi untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Debie K. R. Kalalo, Henny Nikolin Tambingon, & Viktory Nicodemus Joufree Rotty. (2022). Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi dan Dampaknya pada Kreativitas Pembelajaran Guru-guru Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Utara Indonesia. *JOURNAL ON TEACHER EDUCATION*, 4(2), 41–47.
- Muhammad Ramadhana Alfaris. (2022). *Dukungan Sosial dan Aksesibilitas Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi Berorientasi Masa Depan dan Kontinuitas*.
- Mulyah, S., Khoiri, Q., Fatmawati Sukarno Bengkulu, U., Dewa, P., Selebar, K., & Bengkulu, K. (2023). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal on Education*, 05(03), 8270–8280.
- Mustika, D., Yurika Irsanti, A., Setiyawati, E., Yunita, F., Fitri, N., Zulkarnaini, P., Studi, P., Guru, P., & Dasar, S. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(4), 41–50. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1575>
- Nisak, Z. H. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PEJ) PEJ*, 1(2). <http://pej.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/PEJ/index>
- Nurul Qalbi, Nursyafika, & Zulpadl. (2022). Pentingnya Administrasi Humas dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di SMAN 13 Bone. *Jurnal Mappesona*, 5(1), 44–51.
- Rahim, A. (2016). *PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA*.
- Ramadhana, R. N. (2020). *Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*.
- Setiawan, H., Aji, S. M. W., & Aziz, A. (2020). Tiga Tantangan Guru Masa Depan Sekolah Dasar Inklusif. *BRILIANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5. <https://doi.org/10.28926/briliant>
- Suradi, O. : (2020). *MASA DEPAN PENDIDIKAN INKLUSI*.